



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216  
Faksimili (021) 3503466 Website : [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Nomor : B - 2466/SJ/B.VII.1/BA.02/06/2020 Jakarta, 5 Juni 2020  
Lampiran : -  
Hal : Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama

Yth. Ketua FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota Se - Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, dengan ini perlu kami sampaikan bahwa untuk memudahkan pelaksanaan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan tersebut, perlu bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan surat edaran dimaksud kepada masyarakat setempat;
2. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah/Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Ketua Gugus tugas Covid-19 setempat terkait:
  - a. Petugas/Penyuluh/Pendamping/Fasilitator protokol kesehatan di masing-masing rumah ibadah;
  - b. Alat pendukung pada setiap rumah ibadah seperti disinfektan, hand sanitizer (pembersih tangan), masker, alat pengukur suhu tubuh, dan lain-lain.
3. Mendorong masing-masing rumah ibadah membuat:
  - a. Prosedur operasi standar (SOP) dan penjelasan kepada masyarakat atau jamaah yang mudah diakses oleh masyarakat atau jamaah;
  - b. Menetapkan penanggung jawab pelaksanaan ibadah dalam situasi Covid di wilayah tersebut;
  - c. Mempersiapkan alat pendukung protokol kesehatan; dan
  - d. Membuat pernyataan untuk mentaati protokol kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Menteri Agama R.I.  
Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;



MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri  
2. Menteri Kesehatan  
3. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19  
4. Panglima TNI  
5. Kapolri  
6. Kepala Badan Inteligen Negara  
7. Para Gubernur Provinsi;  
8. Para Bupati/Walikota Kab/Kota;  
9. Para Pimpinan Majelis Agama;  
10. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan  
12. Para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE. 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN  
DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN  
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI MASA PANDEMI**

**A. Pendahuluan**

Dalam rangka mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan pengaturan kegiatan di rumah ibadah melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju **masyarakat produktif dan aman Covid**. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampaknya, sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran tentang **Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi** diterbitkan sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-

### C. Ruang Lingkup

Substansi Surat Edaran ini meliputi panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi, yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah atau kolektif.

### D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Arahan Presiden tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tataan Baru (*New Normal*) menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;

### E. Ketentuan

Panduan ini mengatur **kegiatan keagamaan inti** dan **kegiatan keagamaan sosial** di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.

Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka *R-Naught*/RO dan angka *Effective Reproduction Number*/Rt, **berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19**. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang

3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunaanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
4. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
  - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
  - a. Jemaah dalam kondisi sehat;
  - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
  - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
  - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
  - h. Tidak beribadah di rumah ibadah berkapasitas besar dan daya tampung

6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19;
  - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
  - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

#### **F. Penutup**

Panduan ini untuk dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah masing-masing pada masa Pandemi Covid-19.

Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Majelis-majelis Agama terkait. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020



Menteri Agama,

*Fachrul Razi*  
Fachrul Razi